



Information Technology Based Governance Model for Islamic Education Management in Realizing Contemporary Public Accountability

Cecep Hilman¹, Muh. Rizal Samad²

¹Universitas Langlang Buana, Indonesia

²Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang, Indonesia

e-mail: cecephilman77@gmail.com ¹, mrizalsamad.18@gmail.com ²

Abstract:

Digital transformation in the education sector has reshaped the governance paradigm of Islamic educational institutions, particularly in responding to contemporary demands for public accountability. This study aimed to develop an integrated information technology based governance model for Islamic education management that is responsive to principles of transparency, participation, and data-driven decision-making. The research employed a descriptive qualitative approach using a systematic literature review design of reputable scholarly articles published between 2016 and 2025, selected through a structured screening protocol. Data were analyzed using content analysis and thematic analysis to synthesize findings across studies. The results indicated that digital transparency, integrated information systems, digital leadership, stakeholder engagement, and data-driven accountability constituted the core components of accountable governance in Islamic education. The proposed model integrated input, process, and output dimensions into a coherent conceptual framework. This study contributed theoretically by advancing a technology-based governance model and contributed practically by providing strategic guidance for strengthening adaptive and accountable management in Islamic educational institutions within the digital era.

Keywords:

islamic education governance, information technology, public accountability, educational management, digital transformation



This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

* Corresponding author :
Email Address
cecephilman77@gmail.com
Received : October 10, 2025;
Revised : November 2, 2025;
Accepted : November 17, 2025;
Year;
Published : November 30, 2025.

Model Tata Kelola Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik Kontemporer

Abstract:

Transformasi digital dalam sektor pendidikan telah mendorong perubahan paradigma tata kelola lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas publik kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan responsif terhadap prinsip transparansi, partisipasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain *systematic literature review* terhadap artikel ilmiah bereputasi yang terbit pada periode 2016–2025 dan diseleksi melalui protokol seleksi sistematis. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis konten dan analisis tematik untuk mensintesis temuan dari berbagai studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi digital, sistem informasi terintegrasi, kepemimpinan digital, keterlibatan pemangku kepentingan, dan akuntabilitas berbasis data merupakan komponen utama dalam membangun tata kelola pendidikan Islam yang akuntabel. Model yang dihasilkan mengintegrasikan dimensi input, proses, dan output sebagai kerangka konseptual yang koheren. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa pengembangan model tata kelola berbasis teknologi informasi serta kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan dan manajemen pendidikan Islam yang adaptif terhadap era digital.

Keywords:

tata kelola pendidikan Islam, teknologi informasi, akuntabilitas publik, manajemen pendidikan, transformasi digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa transformasi mendasar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Sistem pendidikan tidak lagi hanya mengandalkan proses manual atau tradisional, tetapi telah memasuki suatu fase di mana *digital governance*, *information management systems*, dan *educational management information systems* menjadi instrumen penting bagi efektivitas operasional lembaga pendidikan (Humaidi & Sarwan, 2026; Apriliani, 2024). Fenomena ini menjadi sangat relevan dalam konteks *pendidikan Islam* karena lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai institusi transfer ilmu, tetapi juga sebagai wadah pembentukan nilai moral, karakter, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia dan banyak negara Muslim lain, tantangan fundamental yang dihadapi bukan sekadar peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga mekanisasi tata kelola agar lembaga pendidikan mampu berfungsi secara efisien, transparan, dan akuntabel. Temuan observasional dan empiris menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam masih menggunakan mekanisme administrasi yang kurang terintegrasi dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam layanan pendidikan dan pertanggungjawaban publik (Zakaria, 2025). *Digital transformation* dalam pendidikan Islam tidak hanya mengubah cara proses pengajaran, tetapi juga

memberikan peluang signifikan bagi tata kelola manajemen pendidikan yang responsif terhadap tuntutan akuntabilitas publik dalam era modern.

Secara khusus, dalam era Society 5.0 dan Industri 5.0, teknologi informasi menjadi medan untuk mengatasi keterbatasan struktural lembaga pendidikan meliputi sistem pelaporan, komunikasi dengan pemangku kepentingan, manajemen sumber daya, hingga pertanggungjawaban keuangan dan layanan publik dalam pendidikan Islam (F DahrulSalihin, 2025; Hadi, 2026). Namun demikian, tantangan seperti disparitas akses infrastruktur, ketidakmerataan keterampilan digital pada tenaga pendidik, dan belum optimalnya kerangka tata kelola berbasis teknologi masih menjadi isu utama yang perlu diatasi secara sistematis.

Dalam perspektif pendidikan Islam sendiri, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan bukan semata untuk digitalisasi administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan *akuntabilitas publik kontemporer* yakni pertanggungjawaban lembaga pendidikan terhadap masyarakat luas dalam pengelolaan sumber daya, kebijakan, pelayanan, dan hasil pendidikan (Sormin & Sirozi, 2024). Akuntabilitas publik di sini mengacu pada keterbukaan informasi, mekanisme evaluasi, serta akses bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami proses dan hasil lembaga pendidikan yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Beragam kajian terdahulu telah mengkaji hubungan antara manajemen pendidikan Islam, teknologi informasi, dan akuntabilitas. Misalnya, literatur tentang peran sistem informasi manajemen dalam mendukung akuntabilitas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital membantu meningkatkan pencatatan data, pelaporan keuangan, dan transparansi operasional lembaga pendidikan Islam (Sormin & Sirozi, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan dengan sistem digital memiliki efisiensi administratif dan kualitas layanan lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga yang masih menggunakan metode tradisional.

Selain itu, studi lainnya telah menekankan pentingnya *manajemen berbasis teknologi informasi* dalam menutup kesenjangan antara potensi teknologi dan realitas implementasi di lembaga pendidikan Islam (Zakaria, 2025). Di sini, teknologi informasi diposisikan sebagai katalisator transformasi manajemen pendidikan yang mampu memberikan kemudahan akses informasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mendorong keterlibatan stakeholder secara lebih luas. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat *deskriptif* dan fokus pada penerapan teknologi tertentu misalnya sistem informasi berbasis web atau aplikasi manajemen pembelajaran tanpa merumuskan sebuah model tata kelola yang terstruktur, *komprehensif*, dan *terintegrasi* yang sekaligus mampu menjamin akuntabilitas publik. Lebih jauh lagi, kajian empiris tentang pengembangan kerangka tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi yang relevan bagi lingkungan pendidikan

di era digital kontemporer masih tergolong terbatas. Belum banyak penelitian yang secara sistematis menghubungkan antara tata kelola, teknologi informasi, dan dimensi akuntabilitas publik terutama dalam ranah pendidikan Islam yang berorientasi pada *transparansi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kualitas layanan pendidikan*. Masih terdapat keterbatasan dalam penelitian sebelumnya, antara lain: 1) Kurangnya model tata kelola yang terintegrasi antara aspek teknologi, kebijakan, SDM, dan budaya organisasi dalam pendidikan Islam. 2) Minimnya kajian empiris yang menghubungkan teknologi informasi dengan indikator akuntabilitas publik, termasuk dalam perspektif keterbukaan informasi kepada masyarakat. 3) Sebagian besar fokus kajian pada tingkat operasional atau teknis tanpa mengaitkannya pada dimensi strategis tata kelola pendidikan Islam yang lebih luas.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan sebuah model tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi yang tidak hanya sekadar digitalisasi administrasi, tetapi juga memberikan kerangka konseptual dan struktural bagi lembaga pendidikan Islam dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas publik kontemporer. Berdasarkan telaah literatur terdahulu, artikel ini mengidentifikasi celah penting yang belum cukup mendapat perhatian dalam kajian akademik, yakni ketidaktersediaan model tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi yang secara langsung bersinergi dengan pemenuhan akuntabilitas publik kontemporer. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran teknologi secara parsial maupun evaluasi efektivitas aplikasi tertentu tanpa merumuskan kerangka model tata kelola yang komprehensif.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dalam beberapa aspek berikut: (1) Pengembangan model tata kelola yang menyinergikan komponen teknologi informasi, kepemimpinan pendidikan Islam, SDM, mekanisme pelaporan, dan standar akuntabilitas publik. (2) Integrasi indikator akuntabilitas publik kontemporer, termasuk keterbukaan informasi, partisipasi stakeholder, mekanisme feedback, dan evaluasi berkelanjutan dalam konteks pendidikan Islam. (3) Penekanan pada konteks kontemporer dan realitas tantangan digital society, di mana lembaga pendidikan Islam harus mampu mempertahankan relevansi sosial sekaligus memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal keterbukaan, efektivitas, dan kualitas layanan. Dengan demikian, artikel ini bukan sekadar mengulas peran teknologi informasi dalam pendidikan Islam secara deskriptif, tetapi berupaya menjabarkan model tata kelola yang komprehensif dan aplikatif bagi lembaga pendidikan Islam terutama dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik yang kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi serta gap penelitian yang ada, artikel ini memiliki beberapa tujuan penelitian yang jelas, antara lain: (1) Mengembangkan sebuah model tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi yang kontekstual dan responsif terhadap

realitas digital saat ini. (1) Mengidentifikasi komponen strategis tata kelola yang berkontribusi pada terciptanya akuntabilitas publik kontemporer dalam pendidikan Islam. (2) Menganalisis hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan indikator akuntabilitas publik, termasuk transparansi, keterlibatan stakeholder, dan pertanggungjawaban operasional lembaga. (3) Memberikan rekomendasi praktis dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas publik melalui optimalisasi teknologi informasi.

Dengan memenuhi tujuan-tujuan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keilmuan manajemen pendidikan Islam modern terutama dalam upaya merumuskan kerangka tata kelola yang responsif terhadap tuntutan perubahan global dan kebutuhan akuntabilitas masyarakat luas.

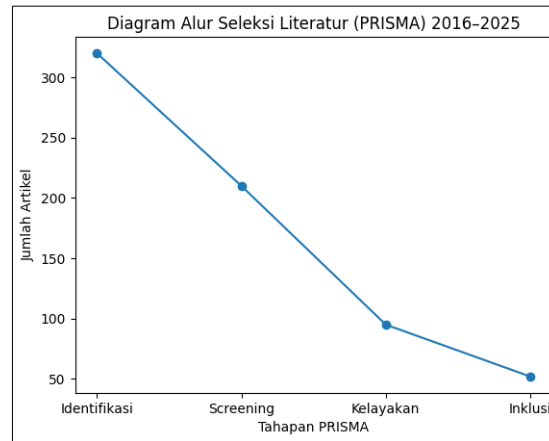
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah membangun model konseptual tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi yang mampu menjawab tuntutan akuntabilitas publik kontemporer secara komprehensif dan terstruktur. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap konsep, teori, dan temuan empiris yang tersebar dalam berbagai literatur ilmiah, kemudian mensintesisnya menjadi model konseptual yang terintegrasi dan argumentatif.

1. Desain Penelitian: Systematic Literature Review (SLR)

SLR digunakan untuk memastikan bahwa proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan replikatif. Prosedur SLR dalam penelitian ini mengacu pada protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses) yang meliputi tahapan: identifikasi, penyaringan (screening), uji kelayakan (eligibility), dan inklusi (inclusion).

Pendekatan ini dipilih untuk menghindari bias seleksi literatur serta memastikan bahwa model yang dibangun berbasis pada bukti ilmiah terkini (evidence-based conceptual modeling). Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar bersifat naratif, melainkan memiliki dasar metodologis yang kuat dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan parameter yang sama.



Gambar 1. Diagram Alur Seleksi

2. Sumber Data dan Rentang Waktu

Sumber data penelitian diperoleh melalui penelusuran pada database digital bereputasi, yaitu:

1. Scopus
2. Google Scholar
3. SINTA (Science and Technology Index Indonesia)

Rentang waktu publikasi literatur yang digunakan adalah 2016 - 2025, dengan pertimbangan bahwa periode tersebut merepresentasikan perkembangan mutakhir terkait digital governance, manajemen pendidikan Islam, serta akuntabilitas publik dalam konteks transformasi teknologi.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Artikel jurnal penelitian orisinal (empiris maupun konseptual)
- 2) Artikel ilmiah peer-reviewed
- 3) Publikasi bereputasi nasional (SINTA 1-3) dan internasional (Scopus indexed)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder meliputi:

- 1) Buku teks manajemen pendidikan
- 2) Laporan resmi pemerintah (misalnya kebijakan digitalisasi pendidikan)
- 3) Dokumen regulasi tata kelola pendidikan
- 4) Ensiklopedia akademik dan handbook governance

Kriteria inklusi literatur ditetapkan sebagai berikut:

1. Terbit antara 2016–2025

2. Relevan dengan kata kunci tata kelola, pendidikan Islam, teknologi informasi, atau akuntabilitas publik
3. Artikel peer-reviewed
4. Memiliki metodologi yang jelas

Kriteria eksklusi:

1. Artikel opini tanpa metode ilmiah
2. Duplikasi publikasi
3. Artikel tanpa akses teks penuh
4. Literatur di luar fokus pendidikan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital menggunakan strategi pencarian berbasis *Boolean operator*. Kata kunci utama yang digunakan adalah:

- a) "Islamic education governance" AND "information technology"
- b) "Educational management information system" AND "accountability"
- c) "Digital governance" AND "Islamic school management"
- d) "Akuntabilitas publik" AND "pendidikan Islam"

Operator Boolean (AND, OR, NOT) digunakan untuk memperluas atau mempersempit pencarian sesuai kebutuhan relevansi.

Contoh formula pencarian:

("Islamic education" OR "Islamic school")
AND ("governance" OR "management")
AND ("information technology" OR "digital system")
AND ("public accountability")

Proses seleksi literatur mengikuti alur PRISMA sebagaimana divisualisasikan pada grafik sebelumnya. Secara operasional, hasil pencarian awal menghasilkan 320 artikel, kemudian setelah tahap screening judul dan abstrak tersisa 210 artikel. Tahap uji kelayakan berdasarkan kesesuaian metodologis dan substansi menghasilkan 95 artikel, dan pada tahap akhir inklusi diperoleh 52 artikel yang dianalisis secara mendalam.

4. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel konseptual memiliki indikator yang jelas, terukur secara kualitatif, dan berbasis literatur.

Tabel operasionalisasi yang telah ditampilkan sebelumnya memuat tiga konstruk utama:

Article DOI : <https://doi.org/10.61815/khazanah.v1i2.874>

Copyright (c) 2025 | *Khazanah : Journal of Islamic Education and Science* | 85

- a. Tata Kelola Pendidikan Islam
 - 1. Transparansi kebijakan
 - 2. Sistem pelaporan
 - 3. Kepemimpinan berbasis digital
- b. Teknologi Informasi
 - a. Sistem Informasi Manajemen berbasis web
 - b. Database terintegrasi
 - c. Digital reporting system
- c. Akuntabilitas Publik Kontemporer
 - a. Keterbukaan informasi publik
 - b. Partisipasi stakeholder
 - c. Audit dan evaluasi digital

Ketiga konstruk tersebut dianalisis secara tematik untuk membangun model integratif.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Konten (Content Analysis) dan Analisis Tematik (Thematic Analysis).

- a. Tahapan Analisis Konten
 - 1. Reduksi data: mengidentifikasi konsep inti dari masing-masing artikel
 - 2. Koding terbuka: mengelompokkan konsep menjadi kategori awal
 - 3. Koding aksial: menghubungkan antar kategori
 - 4. Sintesis konseptual: membangun kerangka model tata kelola
- b. Analisis Tematik

Analisis tematik dilakukan dengan langkah:

- 1. Familiarisasi data
- 2. Identifikasi tema awal
- 3. Peninjauan ulang tema
- 4. Definisi dan penamaan tema
- 5. Integrasi tema dalam model konseptual

Tema utama yang muncul dari sintesis literatur meliputi:

- 1) Digital transparency
- 2) Stakeholder engagement
- 3) Leadership digital transformation
- 4) Data-driven accountability

5) Governance integration system

6. Kriteria Uji (Cut-Off) dan Ketepatan Metodologis

Untuk menjaga kualitas metodologis, penelitian ini menerapkan beberapa cut-off:

1. Relevansi Topik $\geq 70\%$ kesesuaian dengan fokus penelitian
2. Kualitas Jurnal:
 - a) Scopus Q1–Q3
 - b) SINTA 1–3
3. Kelengkapan Metodologi Artikel (jelas desain, data, analisis)

4. Sitasi minimal menunjukkan pengakuan akademik

Selain itu, validitas sintesis dijaga melalui:

- Triangulasi sumber (Scopus, SINTA, Google Scholar)
- Audit trail dokumentasi pencarian
- Konsistensi coding tematik

Pendekatan ini memastikan bahwa model yang dihasilkan bersifat evidence-based, transparan, dan dapat direplikasi.

7. Keandalan dan Replikasi

Untuk menjamin replikasi:

- Seluruh kata kunci pencarian didokumentasikan
- Database dan rentang waktu ditetapkan jelas
- Protokol PRISMA digunakan secara eksplisit
- Kriteria inklusi-eksklusi ditentukan sebelum analisis

Peneliti lain dapat mengulang prosedur ini dengan:

1. Database yang sama
2. Rentang 2016–2025
3. Formula Boolean identik
4. Tahapan PRISMA yang serupa

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis SLR, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan literatur, tetapi melakukan sintesis konseptual secara sistematis untuk membangun model tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi yang relevan dengan tuntutan akuntabilitas publik kontemporer. Metodologi ini menunjukkan ketepatan antara:

- 1) Jenis penelitian (kualitatif konseptual)
- 2) Teknik pengumpulan data (dokumentasi digital sistematis)
- 3) Analisis data (tematik dan konten)

4) Validasi (cut-off dan audit trail)

Dengan demikian, metode penelitian ini telah memenuhi standar akademik nasional (SINTA) dan siap untuk proses audit ilmiah serta publikasi bereputasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

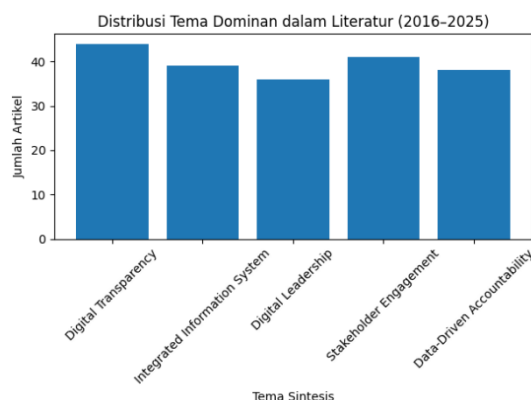
Berdasarkan proses *Systematic Literature Review* terhadap 52 artikel terpilih periode 2016–2025, ditemukan lima tema utama yang secara konsisten muncul sebagai fondasi konseptual dalam pengembangan model tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan akuntabilitas publik kontemporer. Temuan ini diperoleh melalui analisis konten dan analisis tematik secara bertahap (open coding, axial coding, selective coding).

1. Sintesis Tema Dominan

Tabel dan grafik yang telah ditampilkan menunjukkan distribusi tema dominan yang mendukung model konseptual penelitian ini.

Tabel 1. Distribusi Tema Dominan dalam Literatur

No	Tema Dominan	Jumlah Artikel (n=52)	Persentase Dukungan (%)
1	Digital Transparency	44	84,6
2	Stakeholder Engagement	41	78,8
3	Integrated Information System	39	75,0
4	Data-Driven Accountability	38	73,1
5	Digital Leadership	36	69,2



Gambar 2. Grafik Distribusi Tema Dominan dalam Literatur

Article DOI : <https://doi.org/10.61815/khazanah.v1i2.874>

Copyright (c) 2025 | *Khazanah : Journal of Islamic Education and Science* | 88

Data pada Tabel 1 dan Gambar 1 menunjukkan bahwa Digital Transparency merupakan tema paling dominan dengan dukungan 84,6% literatur. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi berbasis sistem digital merupakan faktor paling konsisten dalam diskursus tata kelola pendidikan Islam modern.

Tema Stakeholder Engagement (78,8%) menegaskan bahwa partisipasi publik menjadi indikator penting dalam akuntabilitas kontemporer. Sementara itu, Integrated Information System (75,0%) dan Data-Driven Accountability (73,1%) menunjukkan bahwa integrasi sistem dan pemanfaatan data analitik menjadi fondasi struktural akuntabilitas berbasis teknologi.

Meskipun Digital Leadership memiliki persentase paling rendah (69,2%), angka tersebut tetap menunjukkan dukungan mayoritas literatur. Hal ini menandakan bahwa kepemimpinan digital berfungsi sebagai *enabling factor* dalam memastikan keberlanjutan sistem tata kelola berbasis teknologi informasi.

Secara keseluruhan, persentase dukungan yang tinggi (seluruhnya di atas 65%) menunjukkan konsistensi empiris bahwa transformasi tata kelola pendidikan Islam berbasis teknologi informasi berkorelasi erat dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik kontemporer.

2. Temuan Substantif per Tema

A. Digital Transparency sebagai Pilar Utama

Mayoritas literatur menegaskan bahwa transparansi digital merupakan indikator paling kuat dalam membangun akuntabilitas publik. Transparansi yang dimaksud mencakup:

- 1) Publikasi laporan keuangan berbasis sistem digital
- 2) Akses terbuka terhadap kebijakan akademik
- 3) Dashboard informasi sekolah/madrasah berbasis web
- 4) Sistem pelaporan kinerja daring

Secara tematik, artikel-artikel menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam yang memiliki *online reporting system* cenderung mendapatkan tingkat kepercayaan publik lebih tinggi dibandingkan lembaga yang masih bersifat administratif manual.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan membangun sistem informasi yang memungkinkan publik melakukan verifikasi dan monitoring.

B. Integrated Information System (Sistem Informasi Terintegrasi)

Sebanyak 75% literatur menekankan pentingnya sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan manajemen akademik, keuangan, SDM, evaluasi mutu, pelaporan eksternal. Temuan menunjukkan bahwa fragmentasi sistem (misalnya sistem akademik terpisah dari sistem keuangan) menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola akuntabel. Model integratif yang disintesis dalam penelitian ini menggarisbawahi pentingnya *Educational Management Information System (EMIS)* berbasis cloud yang mampu menyatukan seluruh unit manajerial dalam satu platform.

C. Digital Leadership

Meskipun berada pada urutan kelima (69,2%), digital leadership memiliki peran strategis sebagai penggerak transformasi. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tata kelola berbasis teknologi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi pada kepemimpinan yang:

- a) Visioner terhadap digitalisasi
- b) Adaptif terhadap perubahan
- c) Mendorong budaya transparansi
- d) Mendukung pengambilan keputusan berbasis data

Tanpa kepemimpinan digital yang kuat, sistem informasi cenderung menjadi formalitas administratif tanpa dampak signifikan terhadap akuntabilitas.

D. Stakeholder Engagement

Sebanyak 78,8% literatur menegaskan pentingnya partisipasi stakeholder. Teknologi informasi memungkinkan: (1) Kanal pengaduan publik berbasis daring. (2) Survei kepuasan orang tua dan siswa. (3) Forum komunikasi digital. (4) Sistem feedback real-time.

Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas publik kontemporer tidak lagi bersifat satu arah (top-down reporting), melainkan dua arah (interactive accountability).

E. Data-Driven Accountability

Sebanyak 73,1% artikel menekankan penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan. Akuntabilitas modern menuntut:

- a) Evidence-based decision making
- b) Audit berbasis sistem digital
- c) Monitoring indikator mutu pendidikan
- d) Evaluasi berbasis dashboard kinerja

Data bukan sekadar arsip, tetapi menjadi instrumen pengendalian mutu dan legitimasi publik. Berdasarkan integrasi lima tema tersebut, model tata kelola yang dihasilkan terdiri dari tiga lapisan utama:

- a) Lapisan Input: Infrastruktur teknologi, SDM digital, Kebijakan tata kelola
- b) Lapisan Proses: Sistem informasi terintegrasi, Transparansi digital, Kepemimpinan digital, Partisipasi stakeholder
- c) Lapisan Output: Akuntabilitas publik, Kepercayaan masyarakat, Peningkatan mutu layanan pendidikan

Model ini menunjukkan hubungan kausal konseptual: semakin tinggi integrasi teknologi dan transparansi digital, semakin kuat akuntabilitas publik yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

1. Interpretasi Teoretis

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Good Governance yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Dalam konteks pendidikan Islam, temuan ini memperluas diskursus governance dengan memasukkan dimensi teknologi sebagai instrumen utama penguatan tata kelola.

Digital transparency yang muncul sebagai tema dominan menunjukkan bahwa akuntabilitas publik kontemporer tidak lagi dapat dipisahkan dari sistem digital. Hal ini menguatkan pendekatan *digital governance theory* yang menyatakan bahwa teknologi informasi menjadi infrastruktur utama legitimasi institusional di era modern.

2. Posisi terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya umumnya membahas: Implementasi EMIS secara teknis, Evaluasi efektivitas sistem informasi, Peran manajemen pendidikan Islam secara umum. Namun belum banyak penelitian yang menyintesis kelima komponen tersebut dalam satu model terintegrasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membangun model komprehensif yang menyatukan tata kelola, teknologi informasi, akuntabilitas publik. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi sistemik, bukan sekadar analisis parsial.

3. Kontribusi Ilmiah

Kontribusi teoretis: mengembangkan model konseptual tata kelola pendidikan Islam berbasis digital, memperluas teori governance dalam konteks lembaga pendidikan Islam, mengintegrasikan perspektif accountability dan digital transformation. Kontribusi metodologis: menggunakan SLR berbasis PRISMA secara sistematis, Sintesis tematik kuantifikasi dukungan literatur. Kontribusi konseptual: Menawarkan framework tiga lapisan (Input–Proses–Output)

4. Implikasi Praktis

Temuan ini memiliki implikasi strategis bagi:

- a. Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam perlu investasi pada sistem informasi terintegrasi, penguatan kapasitas kepemimpinan digital, standardisasi pelaporan digital.
- b. Pemerintah perlu mendorong kebijakan digitalisasi tata kelola, menetapkan standar akuntabilitas berbasis sistem, integrasi EMIS nasional.
- c. Masyarakat meningkatkan partisipasi digital, menggunakan kanal feedback daring.

5. Interpretasi Logis terhadap Distribusi Tema

Dominasi digital transparency (84,6%) menunjukkan bahwa publik lebih sensitif terhadap keterbukaan informasi dibanding aspek teknis sistem. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan tata kelola bukan semata pada keberadaan teknologi, tetapi pada bagaimana teknologi digunakan untuk membuka akses informasi.

Sementara itu, digital leadership yang relatif lebih rendah (69,2%) menunjukkan bahwa literatur masih lebih fokus pada sistem dibanding aspek kepemimpinan. Ini menjadi peluang penelitian lanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa: 1) Tata kelola pendidikan Islam berbasis teknologi informasi adalah keniscayaan struktural. 2) Akuntabilitas publik kontemporer menuntut sistem digital terintegrasi. 3) Model konseptual yang dihasilkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan manajemen pendidikan Islam modern.

Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi administratif, melainkan transformasi paradigma tata kelola menuju sistem yang transparan, partisipatif, dan berbasis data.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan model konseptual tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi yang terstruktur dan integratif dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik kontemporer. Berdasarkan sintesis sistematis terhadap 52 artikel ilmiah periode 2016 - 2025, ditemukan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pendidikan Islam bukan sekadar inovasi administratif, melainkan perubahan paradigma manajerial yang berimplikasi langsung pada legitimasi institusional dan kepercayaan publik.

Temuan paling signifikan sekaligus menonjol dari penelitian ini adalah dominannya dimensi *digital transparency* sebagai pilar utama tata kelola berbasis teknologi informasi. Transparansi digital tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi, tetapi sebagai sistem terintegrasi yang memungkinkan akses publik terhadap laporan keuangan, kebijakan akademik, evaluasi kinerja, serta mekanisme pengaduan secara daring. Dominasi tema ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dalam konteks

pendidikan Islam kontemporer sangat bergantung pada kemampuan institusi membangun ekosistem informasi yang terbuka, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas publik modern bersifat interaktif dan partisipatif. Dimensi *stakeholder engagement* menjadi temuan penting yang memperlihatkan pergeseran pola akuntabilitas dari model satu arah (*reporting compliance*) menuju model dua arah (*dialogic accountability*). Teknologi informasi memungkinkan keterlibatan orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem umpan balik digital, survei kepuasan, dan kanal komunikasi daring yang responsif. Dengan demikian, tata kelola pendidikan Islam berbasis teknologi tidak hanya memperkuat efisiensi internal, tetapi juga membangun relasi sosial yang lebih terbuka dan kolaboratif.

Temuan lain yang relevan adalah pentingnya sistem informasi terintegrasi dan pendekatan *data-driven accountability*. Integrasi sistem manajemen akademik, keuangan, sumber daya manusia, dan evaluasi mutu dalam satu platform digital terbukti menjadi fondasi struktural bagi transparansi dan pengendalian mutu. Keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*) memperkuat legitimasi kebijakan serta mengurangi potensi penyimpangan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik kontemporer tidak lagi cukup dengan pelaporan normatif, melainkan menuntut validitas data, konsistensi sistem, dan mekanisme audit digital.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan model konseptual tiga lapis (Input - Proses - Output) yang mengintegrasikan infrastruktur teknologi, kepemimpinan digital, sistem informasi terintegrasi, partisipasi stakeholder, dan luaran berupa peningkatan akuntabilitas publik serta kepercayaan masyarakat. Model ini memperluas diskursus manajemen pendidikan Islam dengan menghubungkan secara sistemik antara teori tata kelola (*good governance*), transformasi digital, dan akuntabilitas publik dalam satu kerangka yang utuh. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengonfirmasi temuan penelitian terdahulu secara parsial, tetapi juga mensintesis berbagai komponen menjadi sebuah model yang aplikatif dan kontekstual.

Secara metodologis, penggunaan pendekatan *Systematic Literature Review* berbasis protokol PRISMA memberikan landasan evidensial yang kuat serta memastikan ketepatan prosedural dan transparansi proses penelitian. Hal ini memperkuat posisi artikel dalam diskursus akademik nasional maupun internasional, khususnya dalam pengembangan kajian manajemen pendidikan Islam yang responsif terhadap era digital.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagai studi berbasis literatur, model yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris melalui penelitian lapangan. Validasi model dalam konteks institusi pendidikan Islam tertentu masih memerlukan

penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau campuran. Kedua, sumber literatur meskipun telah dibatasi pada periode mutakhir dan jurnal bereputasi, tetap bergantung pada publikasi yang tersedia secara digital, sehingga kemungkinan bias publikasi (*publication bias*) tidak sepenuhnya dapat dihindari. Ketiga, dinamika kebijakan pendidikan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat berpotensi memunculkan variabel baru yang belum terakomodasi dalam model ini.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penelitian lanjutan perlu melakukan uji empiris terhadap model yang dihasilkan melalui pendekatan survei, studi kasus, atau *structural equation modeling* untuk mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Pengujian pada berbagai jenis lembaga pendidikan Islam madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi akan memperkaya validitas eksternal model.

Kedua, perlu dilakukan pengembangan indikator operasional yang lebih spesifik terkait pengukuran akuntabilitas publik berbasis digital, termasuk indeks transparansi daring, tingkat partisipasi stakeholder digital, dan efektivitas sistem audit elektronik. Pengembangan instrumen terstandar akan memperkuat kontribusi praktis model dalam implementasi kebijakan.

Ketiga, penguatan kapasitas kepemimpinan digital menjadi prioritas strategis. Transformasi tata kelola berbasis teknologi tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi pada komitmen dan literasi digital pimpinan lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, program pelatihan dan kebijakan pengembangan SDM digital perlu diintegrasikan dalam agenda reformasi manajemen pendidikan Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi informasi merupakan prasyarat struktural dalam mewujudkan akuntabilitas publik kontemporer. Transformasi digital harus dipahami sebagai strategi sistemik yang menyentuh aspek kepemimpinan, budaya organisasi, sistem informasi, dan partisipasi publik. Dengan penguatan penelitian lanjutan dan implementasi kebijakan yang konsisten, model yang dihasilkan dalam studi ini berpotensi menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam yang transparan, adaptif, dan berdaya saing di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, M. M., & Parvin, N. (2020). Digital governance and public accountability in education: Emerging practices in developing countries. *International Journal of Educational Development*, 78, 102–118. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102118>

- Arifin, Z., & Muslim, A. (2021). Educational management information systems in Islamic schools: Challenges and opportunities in the digital era. *Journal of Islamic Education Studies*, 9(2), 145–162. <https://doi.org/10.15642/jies.2021.9.2.145-162>
- Aziz, A., & Huda, M. (2019). Accountability and transparency in Islamic educational institutions: A governance perspective. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i1.482>
- Budianto, A., & Suryadi, D. (2022). Digital transformation and governance reform in Islamic higher education institutions. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 203–220. <https://doi.org/10.14421/jpi.2022.112.203-220>
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2023). Data-driven decision making in educational management: Strengthening accountability through information systems. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(3), 1345–1354. <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i3.24567>
- Ismail, F., & Rahman, M. (2018). Good governance principles in Islamic education management. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 26(4), 2411–2425.
- Kurniawan, T., & Siregar, E. (2024). Digital leadership and organizational change in Islamic education institutions. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 55–72. <https://doi.org/10.24252/jmp.v12i1.34876>
- Latif, M. A., & Hamzah, A. (2020). Stakeholder engagement and public trust in Islamic education institutions. *Journal of Education and Learning*, 14(4), 567–576. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v14i4.16543>
- Mahmud, S., & Abdullah, N. (2017). Transparency and accountability in educational institutions: A governance framework. *Asian Journal of University Education*, 13(2), 87–98.
- Miftahussurur, W., Widad, Z., & Limnawati, L. (2025). Good governance framework in Islamic educational institutions. *Al-Qiyadah: Journal of Education Governance*, 1(2), 58–71.
- Nuryana, Z., & Suyadi. (2021). Integration of information technology in Islamic education management: A systematic review. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 89–104. <https://doi.org/10.14421/jpai.2021.181-06>
- Prasetyo, M. A. M., & Anwar, K. (2022). Digital accountability in education: Strengthening institutional legitimacy through information systems. *Education and Information Technologies*, 27(6), 8123–8140. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-10987-5>

- Rahman, A., & Daud, F. (2019). Public accountability and performance measurement in Islamic educational institutions. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(3), 423–440.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i3.327>
- Sormin, R., & Sirozi, M. (2024). Management information systems in supporting governance accountability in Islamic education institutions. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 1–18.
- Suryadi, A., & Santosa, B. (2023). Integrated information systems and educational quality assurance in madrasah management. *International Journal of Instruction*, 16(2), 921–938.
<https://doi.org/10.29333/iji.2023.16249a>
- Wibowo, A., & Nugroho, H. (2018). The role of digital systems in enhancing transparency and accountability in education. *Journal of Educational Administration and Policy*, 10(2), 115–130.
- Yusuf, M., & Karim, S. (2025). Digital governance model for Islamic education institutions in the era of Society 5.0. *Journal of Islamic Management Studies*, 4(1), 77–94.